COLLABORATIVE GOVERNANCE PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

(Studi Kasus di Kawasan Jalan Lettu Bakri, Jalan Yulius Usman, dan Jalan Pasundan)

An'nisa Sulistya Permatasari
NPP. 33.0369
Program Studi Praktik Perpolisian dan Tata Pamong
Email: annisasulistya17@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. H. M Wiredarme, S.Pd., MH
Email: wiredarme@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *This study is motivated by the persistent issues of public order and tranquility in Sukabumi City, particularly in the areas of Lettu Bakri Street, Yulius Usman Street, and Pasundan Street, such as traffic congestion, illegal parking, and unregulated street vendors. These conditions indicate suboptimal inter-agency coordination, low public participation, and weak synergy among stakeholders in maintaining public order.* ***Purpose:*** *This research aims to analyze the implementation of Collaborative Governance, the roles and synergy among actors, as well as the efforts of the local government in managing public order and tranquility in Sukabumi City.* ***Method:*** *This study employs a qualitative approach using a descriptive case study method. Data were collected through observation, interviews with 12 informants, and documentation. The data were analyzed using NVivo 15 software with inductive analysis, and validity was ensured through source and method triangulation.* ***Result:*** *The results show that Collaborative Governance has involved various actors, including the Civil Service Police Unit (Satpol PP), Police, Transportation Agency, Regional Development Planning Agency (Bappeda), Department of Cooperatives and Trade, sub-district and village administrations, informal sector actors, and the community. Collaboration is conducted through coordination forums, inter-actor dialogue, and gradual enforcement actions. However, its implementation remains suboptimal due to unequal roles, weak coordination, low public participation, lack of trust among stakeholders, and the absence of continuous monitoring and evaluation.* ***Conclusion:*** *The success of Collaborative Governance requires strengthening facilitative leadership, clarifying roles, enhancing public participation, and improving coordination and evaluation to achieve a more effective and sustainable public order management.*

Keywords: *Collaborative Governance; Community Participation; Local Government; Public Order And Tranquility; Stakeholder Synergy.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Sukabumi, khususnya di kawasan Jalan Lettu Bakri, Jalan Yulius Usman, dan Jalan Pasundan, seperti kemacetan, parkir liar, serta penataan pedagang kaki lima yang belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya koordinasi lintas instansi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya sinergi antaraktor dalam penyelenggaraan ketertiban umum. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum di Kota Sukabumi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara terhadap 12 informan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif menggunakan perangkat lunak NVivo 15 dengan uji keabsahan melalui triangulasi sumber dan metode. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* telah melibatkan berbagai aktor seperti Satpol PP, Kepolisian, Dinas Perhubungan, Bappeda, Diskumindag, perangkat kecamatan dan kelurahan, pelaku usaha, serta masyarakat. Kolaborasi dilakukan melalui forum koordinasi, dialog antaraktor, dan penertiban secara bertahap. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat ketimpangan peran, lemahnya koordinasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum adanya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. **Kesimpulan:** Keberhasilan *Collaborative Governance* memerlukan penguatan kepemimpinan fasilitatif, kejelasan peran, peningkatan partisipasi, serta perbaikan koordinasi dan evaluasi agar penyelenggaraan ketertiban umum lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Collaborative Governance*; Ketenteraman Dan Ketertiban Umum; Partisipasi Masyarakat; Pemerintahan Daerah; Sinergi Antaraktor.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan tata kelola pemerintahan global mengalami transformasi signifikan seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pola pemerintahan yang sebelumnya bersifat hierarkis kini beralih menuju model jaringan (network governance) yang mengutamakan kolaborasi dan kemitraan antaraktor. Penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi hanya diukur dari kemampuan birokrasi, tetapi juga sejauh mana pemerintah mampu membangun komunikasi dengan publik serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan.

Konsep tata kelola kolaboratif atau *Collaborative Governance* didefinisikan sebagai suatu proses di mana lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan nonpemerintah dalam pengambilan keputusan bersama secara formal, konsensus, dan deliberatif untuk merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan publik (Ansell & Gash, 2008). Pendekatan ini relevan diterapkan untuk mengintegrasikan kepentingan dan sumber daya dari berbagai aktor dalam menjaga stabilitas sosial serta menciptakan keteraturan kehidupan masyarakat perkotaan.

Urusan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) merupakan tanggung jawab wajib pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di Kota Sukabumi, kawasan Jalan Lettu Bakri, Jalan Yulius Usman, dan Jalan Pasundan menjadi titik rawan ketidaktertiban, ditandai kemacetan, parkir liar, dan penataan pedagang kaki lima (PKL) yang belum optimal. Permasalahan ini semakin kompleks mengingat pertumbuhan penduduk yang signifikan, dengan tiga kecamatan yakni Cikole (0,49%), Lembursitu (0,58%), dan Warudoyong (0,57%) mencatat laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2025. Dapat dilihat pada Gambar berikut ini :

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konsep teoritis *Collaborative Governance* dan implementasinya di lapangan. Penelitian mengenai penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Sukabumi menjadi penting karena meningkatnya mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi telah memperumit dinamika ruang publik. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar kepentingan masyarakat, aparat, dan pelaku usaha dapat diharmoniskan tanpa menimbulkan konflik.

1.2 Kesenjangan Masalah (Research Gap)

Penelitian terdahulu oleh Devine dkk. (2024), Firdausi dkk. (2023), Rusliadi & Hasriadi (2025), Mutiarawati & Sudarmo (2021), serta Ahad & Barsei (2023) membahas penerapan *Collaborative Governance* dalam konteks pelayanan publik, pariwisata, kesehatan, penanganan bencana, dan transformasi digital. Sebagian besar penelitian tersebut dilakukan pada konteks wilayah dengan karakteristik sosial dan tata kelola yang berbeda. Terdapat kesenjangan kontekstual *(contextual gap)* yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam memahami bagaimana implementasi *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah perkotaan dengan intensitas aktivitas ekonomi informal yang tinggi, sebagaimana terjadi di kawasan Jalan Lettu Bakri, Jalan Yulius Usman, dan Jalan Pasundan di Kota Sukabumi.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan Trantibum di Kota Sukabumi sebagai dasar perumusan strategi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat untuk memahami dinamika kolaborasi antaraktor secara faktual, sehingga upaya penyelenggaraan ketertiban umum berpotensi stagnan dan tidak tepat sasaran.

1.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian relevan menjadi dasar konseptual penelitian ini. Pertama, Devine, Wirantaria, dan Purnamaningsih (2024) meneliti *Collaborative Governance* dalam pengelolaan pengaduan kelompok rentan di Kabupaten Badung menggunakan metode kualitatif dengan teori Ansell & Gash (2008). Hasilnya menunjukkan kolaborasi berjalan cukup baik namun belum optimal akibat minimnya pertemuan rutin dan monitoring. Kedua, Firdausi, Primasworo, dan Abdillah (2023) menganalisis *Collaborative Governance* dalam pengelolaan pariwisata di Probolinggo, menemukan bahwa koordinasi antarpihak masih lemah. Ketiga, Rusliadi dan Hasriadi (2025) meneliti penanggulangan stunting di Pasangkayu dan menemukan kepercayaan antaraktor menjadi kunci keberhasilan. Keempat, Mutiarawati dan Sudarmo (2021) mengkaji penanganan rob di Pekalongan, menemukan kolaborasi belum optimal akibat rendahnya kepercayaan dan keterbatasan sumber daya. Kelima, Ahad dan Barsei (2023) menganalisis implementasi SPBE di Polewali Mandar, menemukan komitmen pimpinan sebagai faktor kunci.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yang membedakannya dari penelitian terdahulu. Studi ini secara khusus menitikberatkan pada penerapan *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Sukabumi, dengan melibatkan kolaborasi antara Satpol PP, Dishub, Bappeda, Diskumindag, POLRI, Kecamatan, dan Kelurahan serta partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha informal. Fokus ini merupakan inovasi kajian yang belum banyak diteliti dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah.

1.6 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Sukabumi; (2) menganalisis peran serta sinergi antaraktor dalam pelaksanaan *Collaborative Governance*; dan (3) mengidentifikasi upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan *Collaborative Governance* di kawasan Jalan Lettu Bakri, Jalan Yulius Usman, dan Jalan Pasundan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus *(case study)* yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami makna kolaborasi yang terjadi dalam *Collaborative Governance* penyelenggaraan Trantibum di Kota Sukabumi yang bersifat kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap interaksi antaraktor di lapangan. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif berfokus pada pencarian makna dan pemahaman terhadap fenomena sosial dari sudut pandang para pelaku yang terlibat.

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan 12 informan yang terdiri dari tujuh informan sektor publik (Satpol PP, Dishub, Diskumindag, Bappeda, Polres, Kecamatan Warudoyong, dan Kelurahan Nyomplong), tiga informan sektor swasta (pedagang emperan, pedagang lapak, dan pedagang kaki lima), serta dua informan masyarakat/warga sekitar. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif pasif, wawancara terstruktur mendalam, dan studi dokumentasi.

Analisis data memanfaatkan aplikasi NVivo 15 sebagai instrumen bantu dalam mengelola dan menganalisis data kualitatif secara sistematis. Proses analisis dilakukan melalui tahapan perumusan nodus, pengkodean (coding) secara induktif berdasarkan kerangka *Collaborative Governance Ansell & Gash (2008),* analisis *word cloud,* strukturisasi nodus terhadap lima dimensi *Collaborative Governance*, hingga analisis dendrogram untuk melihat korelasi antarnodus. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Penelitian dilaksanakan di Kota Sukabumi pada Januari 2026.

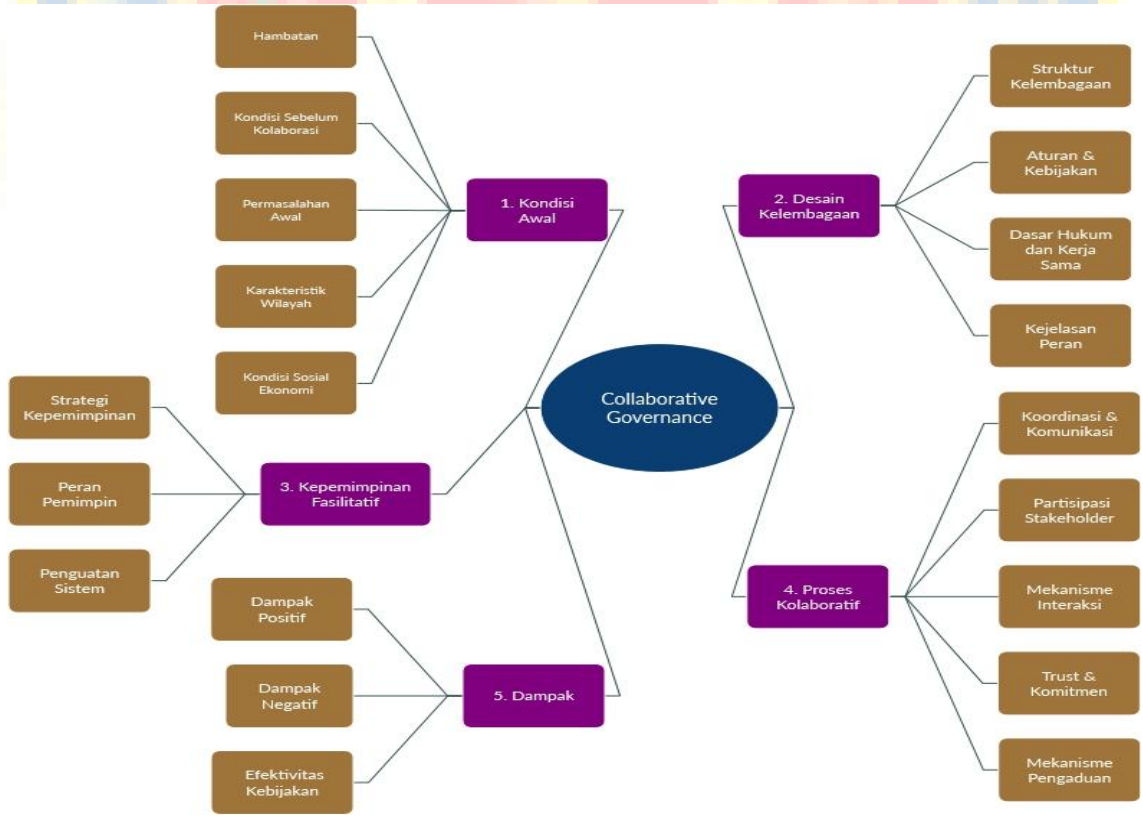

Sumber: Olah Data NVivo 15, 2026

Gambar 2.1 Bagan dimensi *Collaborative Governance* dan sub-dimensi (tema) yang teridentifikasi pada data

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi *Collaborative Governance* dalam Penyelenggaraan Trantibum di Kota Sukabumi

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan analisis data NVivo 15, implementasi *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Sukabumi telah berjalan melalui mekanisme koordinasi lintas sektor yang terstruktur. Pemerintah daerah telah menggeser paradigma penegakan aturan dari pendekatan represif murni menuju pendekatan kolaboratif yang mengedepankan dialog dan sosialisasi, sebagaimana tercermin dari tingginya frekuensi kode "Koordinasi & Komunikasi" (20 referensi) dan "Pendekatan Persuasif" (9 referensi) dalam analisis NVivo.

Tabel 3.1
Nodus Representatif Pada Bahasan 1

Nodus	Alasan Representasi
Aturan & Kebijakan	Merupakan instrumen operasional yang mengatur tata cara kolaborasi dan penertiban.
Dasar Hukum dan Kerja Sama	Landasan legal formal (MoU, Perda, Perwal) yang melegitimasi aksi kolaboratif.
Mekanisme Interaksi	Menjelaskan bagaimana dialog, musyawarah, dan pertemuan dilaksanakan sebagai inti governance.
Mekanisme Pengaduan	Saluran partisipatif masyarakat/pedagang sebagai bentuk akuntabilitas proses.
Struktur Kelembagaan	Gambaran formal kelembagaan (Forkopimda, Satpol PP, dll.) yang menjalankan kolaborasi.
Efektivitas Kebijakan	Indikator untuk menilai sejauh mana implementasi mencapai tujuan yang diharapkan.
Kondisi Sebelum Kolaborasi	Baseline kondisi awal yang menjadi alasan perlunya perubahan tata kelola.
Karakteristik Wilayah	Konteks spasial dan sosial yang memengaruhi desain dan pelaksanaan implementasi.

Sumber: Olah Data NVivo 15, 2026

Implementasi ini diwujudkan melalui pembentukan Forum Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, Diskumindag, Polres, pemerintah kecamatan dan kelurahan. Di kawasan studi kasus, mekanisme ini terlihat dari adanya tahapan penertiban yang diawali dengan surat peringatan berjenjang (SP 1, 2, dan 3), audiensi dengan perwakilan pedagang, hingga penataan ulang zonasi jalan. Kepala Seksi Pembinaan Satpol PP menyatakan: "Dari awal sudah dilibatkan. Jadi ada tahapan-tahapan koordinasi dan sosialisasi ke masyarakat dan PKL. Biasanya Disperindag dulu yang kirim surat peringatan, dikasih tenggat waktu. Kalau sampai waktunya belum juga ditindaklanjuti, baru Satpol PP turun buat penertiban."



Sumber: Olah Data NVivo 15, 2026

Gambar 3.1 *Word Cloud (Awan Kata)* Nodus

Implementasi *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Sukabumi ditandai oleh pergeseran dari pendekatan represif menuju tata kelola yang lebih terstruktur, berbasis regulasi, dan melibatkan berbagai pihak. Pelaksanaannya didukung oleh pembagian peran yang jelas sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dengan Satpol PP sebagai penegak Perda, Dishub mengatur lalu lintas, Diskumindag membina pedagang, serta Kepolisian, kecamatan, dan kelurahan yang mendukung pengamanan dan pendampingan wilayah.

Secara kelembagaan, pelaksanaan ini berpijak pada kerangka hukum daerah yang telah dikonsolidasikan melalui forum lintas sektor. Satpol PP berperan sebagai penegak Perda, Dishub mengelola penataan lalu lintas, Diskumindag fokus pada pembinaan pedagang, sementara kepolisian serta aparatur kecamatan dan kelurahan berperan dalam pendampingan wilayah. Narasumber dari Bappeda menegaskan: "Dasar utamanya itu peraturan daerah. Di situ sudah diatur zonasi, mana yang boleh dan tidak boleh untuk berjualan. Jadi perda itu jadi pegangan bersama supaya di lapangan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan."

Namun demikian, efektivitas implementasi masih terpolarisasi. Di satu sisi terjadi perbaikan infrastruktur dan kelancaran lalu lintas, namun di sisi lain muncul boomerang effect dimana pedagang kembali ke lokasi semula akibat lokasi relokasi yang dinilai kurang strategis dan biaya sewa yang tinggi. Hal ini terkonfirmasi melalui korelasi kuat (r = 0,816) antara kode "Relokasi Sepi Pembeli" dan "Penurunan Pendapatan" dalam analisis dendrogram NVivo. Satpol PP mengakui: "Tertibnya hanya sebentar, efektifnya hanya 2 sampai 3 bulan pertama saja."

Secara teoretis, temuan ini dapat dipetakan ke dalam dimensi Institutional Design dan Collaborative Process dalam model *Collaborative Governance Ansell & Gash (2008).* Aspek Institutional Design telah terpenuhi sebagian melalui landasan regulasi Perda Nomor 2 Tahun 2004 dan Perda Nomor 10 Tahun 2013. Namun, terdapat kesenjangan pada aspek inklusivitas dan komitmen formal, dimana sosialisasi sering hanya menjangkau perwakilan pedagang dan komitmen kolaborasi lebih bersifat kesepahaman operasional dibandingkan perjanjian tertulis (MoU). Dengan demikian, implementasi *Collaborative Governance* di Kota Sukabumi dapat dikategorikan sebagai kolaborasi yang prosedural-mapan namun substantif-berlanjut, berada pada tahap *intermediate outcome*.

3.2 Peran Serta Sinergi Antaraktor dalam Penyelenggaraan Trantibum di Kota Sukabumi

Peran serta sinergi antaraktor dalam penyelenggaraan Trantibum di Kota Sukabumi telah terbangun melalui pembagian tugas yang relatif jelas namun masih menghadapi tantangan dalam konsistensi koordinasi operasional. Satpol PP berperan sebagai leading sector dalam penegakan peraturan daerah, Dinas Perhubungan

fokus pada penataan lalu lintas, Diskumindag menangani pembinaan dan data pedagang, serta Polresta Sukabumi memberikan dukungan pengamanan.

Tabel 3.2
Nodus Representatif Pada Bahasan 2

Nodus	Alasan Representasi
Partisipasi Stakeholder	Nodus inti yang merekam bentuk dan tingkat keterlibatan berbagai aktor.
Koordinasi & Komunikasi	Menunjukkan kualitas pertukaran informasi dan sinkronisasi aksi antar-aktor.
Struktur Kelembagaan	(Overlap dengan poin 1) Menjelaskan pembagian peran formal antar-instansi.
Kejelasan peran	Kritikal untuk menghindari tumpang-tindih dan memastikan akuntabilitas masing-masing aktor.
Trust & Komitmen	Fondasi relasional (soft infrastructure) yang menentukan keberlanjutan sinergi.
Kondisi Sosial Ekonomi	Konteks yang memengaruhi motivasi, resistensi, atau dukungan aktor terhadap kolaborasi.
Kapasitas Sumber Daya	Ketersediaan SDM, anggaran, dan sarana yang memengaruhi kontribusi masing-masing aktor.

Sumber: Olah Data NVivo 15, 2026

Berdasarkan observasi dan analisis data, sinergi antaraktor dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Sukabumi telah terbangun melalui pembagian tugas yang jelas, meskipun masih menghadapi tantangan dalam konsistensi koordinasi operasional. Satpol PP berperan sebagai *leading sector* penegakan Perda, Dishub menangani penataan lalu lintas, Diskumindag membina pedagang, dan Polresta Sukabumi mendukung pengamanan. Analisis NVivo menunjukkan tingginya keterkaitan antara "Peran Satpol PP", "Kolaborasi Lintas Sektor", dan "Kejelasan Peran", yang mengindikasikan bahwa fungsi masing-masing aktor telah dipahami dengan baik. Namun, keterlibatan pelaku usaha informal belum sepenuhnya inklusif karena informasi kebijakan sering kali hanya diterima oleh perwakilan pedagang. Selain itu, keterbatasan anggaran dan personel di tingkat kecamatan dan kelurahan menyebabkan pengawasan pascapenertiban belum optimal, sehingga sebagian pedagang kembali menempati lokasi semula.

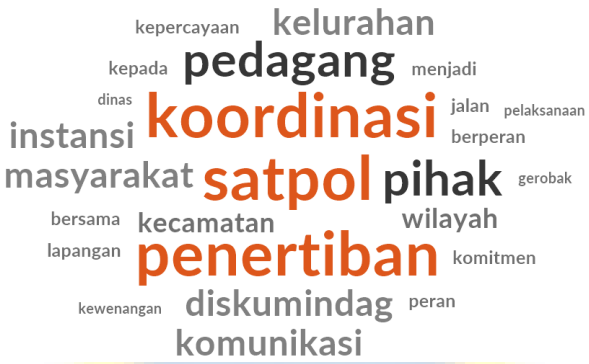

Sumber: Olah Data NVivo 15, 2026

Gambar 3.2 *Word Cloud* (Awan Kata) Nodus

Analisis *Word Cloud* pada nodus representatif menunjukkan bahwa sinergi antaraktor merupakan faktor penting dalam keberhasilan *Collaborative Governance*. Nodus "koordinasi", "keagenan", "komunikasi", dan "bersama" mengindikasikan bahwa penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Tata Tertib Publik di Kota Sukabumi dilaksanakan melalui kolaborasi antara Satpol PP, Dishub, Diskumindag, Polres, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pembagian peran yang jelas menjadi dasar penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas masing-masing instansi.

Tabel 3.3
Ringkasan Statistik *Word Cloud* (Awan Kata)

Kata	Frekuensi	Implikasi Analitis
Pedagang	33	Menjadi subjek utama kebijakan; fokus analisis pada dampak kebijakan terhadap kelompok ini
Pihak	31	Menunjukkan kompleksitas multi-aktor dalam kolaborasi
Masyarakat	24	Partisipasi publik menjadi elemen krusial dalam *Collaborative Governance*
Satpol	23	Satpol PP sebagai leading sector penegakan perda
Pkl	14	Sub-kategori pedagang yang paling sering menjadi objek penertiban
Diskumindag	11	Peran pembinaan ekonomi informal dalam kolaborasi
Kelurahan	12	Fungsi pendampingan wilayah dan komunikasi akar rumput

Sumber: Olah Data NVivo 15, 2026

Analisis *word cloud* menunjukkan kata "pedagang" muncul 33 kali sebagai aktor utama, diikuti "pihak" (31 kali) yang menggambarkan kompleksitas multi-aktor, serta "masyarakat" (24 kali) dan "satpol" (23 kali) yang menegaskan partisipasi publik dan peran Satpol PP sebagai pilar utama. Sekretaris Dinas Perhubungan menjelaskan: "Tidak ada instansi yang bisa berjalan sendiri atau merasa paling dominan. Dishub fokus pada aspek

lalu lintas dan parkir, Satpol PP pada penegakan perda dan penertiban, sementara kecamatan dan kelurahan lebih ke pendekatan wilayah. Semua saling melengkapi."

Sinergi multi-stakeholder menghasilkan dampak yang cukup positif bagi masyarakat, dimana kehadiran gabungan berbagai instansi menciptakan efek pencegahan yang lebih konstruktif. Perwakilan masyarakat menyatakan: "Kalau instansi kerja sendiri, Satpol PP aja razia pasti pedagang balik lagi besoknya. Tapi sekarang ada Diskumindag kasih lokasi relokasi di Pasar Pelita, Polres patroli rutin, Dishub bikin marka kuning, jadi PKL nggak berani balik."

Namun, sinergi ini belum sepenuhnya inklusif karena informasi kebijakan sering hanya diterima oleh perwakilan pedagang. Pemerintah kecamatan dan kelurahan berperan sebagai jembatan komunikasi, tetapi keterbatasan anggaran dan personel membuat pengawasan pasca-penertiban tidak berkelanjutan. Jika dikaitkan dengan teori Penta Helix, terdapat ketimpangan peran yang cukup substansial, dimana unsur akademisi dan media hampir tidak terlihat, menunjukkan bahwa sinergi yang terbangun lebih bersifat government-community driven. Sinergi ini dapat dikategorikan sebagai kolaborasi hibrida yang menggabungkan mekanisme hierarkis birokrasi dengan jaringan partisipatif masyarakat, namun masih bersifat top-down coordinated.

3.3 Upaya Pemerintah dalam Mengimplementasikan *Collaborative Governance* di Kota Sukabumi

Pemerintah Kota Sukabumi telah melakukan berbagai upaya strategis untuk mengimplementasikan *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan Trantibum, meskipun masih menghadapi tantangan di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan upaya pemerintah terfokus pada tiga aspek utama: (1) penguatan kelembagaan, (2) optimasi sumber daya, dan (3) inovasi komunikasi.

Penguatan kelembagaan diwujudkan melalui pembentukan forum koordinasi lintas sektor, penyusunan SOP penertiban berbasis tahapan, dan penyediaan relokasi di Pasar Pelita. Lurah Nyomplong menegaskan: "Prinsip utama adalah tidak mengambil keputusan secara sepihak. Semua kebijakan harus melalui proses sosialisasi dan musyawarah. Seluruh pihak harus konsisten terhadap keputusan yang telah disepakati." Dalam dimensi kepemimpinan fasilitatif, pimpinan daerah berperan aktif menginisiasi rapat koordinasi, mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, dan memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif.

Tabel 3.4
Nodus Representatif Pada Bahasan 3

Nodus	Alasan Representasi
Strategi Kepemimpinan	Pendekatan pemimpin (humanis, persuasif, edukatif) dalam menggerakkan kolaborasi.
Strategi Perbaikan	Langkah-langkah korektif dan adaptif berdasarkan evaluasi di lapangan.
Penguatan Sistem	Upaya institusionalisasi dan optimalisasi mekanisme kolaborasi jangka panjang.
Peran Pimpinan	Tindakan konkret pimpinan dalam inisiasi, mediasi, dan pengambilan keputusan.
Hambatan	Identifikasi kendala yang dihadapi pemerintah sebagai dasar perumusan strategi.

Nodus	Alasan Representasi
Permasalahan Awal	Akar masalah yang memicu perlunya intervensi dan inovasi kebijakan.
Dampak Positif & Dampak Negatif	Outcome yang digunakan untuk merefleksikan keberhasilan dan area perbaikan upaya pemerintah.

Sumber: Olah Data NVivo 15, 2026

Berdasarkan observasi dan analisis data, Pemerintah Kota Sukabumi telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum melalui penguatan kelembagaan, optimalisasi sumber daya, dan inovasi komunikasi. Analisis NVivo pada nodus *Strategi Perbaikan* dan *Penguatan Sistem* menunjukkan fokus pada koordinasi lanjutan, pendekatan persuasif, penyediaan relokasi, dan optimalisasi sumber daya. Implementasinya dilakukan melalui forum koordinasi, penyusunan SOP penertiban, penyediaan relokasi di Pasar Pelita, serta pembagian wilayah patroli dan penataan lalu lintas. Namun, relokasi masih menghadapi kendala biaya dan aksesibilitas sehingga sebagian pedagang kembali ke lokasi semula. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah telah berjalan secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan substantif di lapangan.



Sumber: Olah Data NVivo 15, 2026

Gambar 3.3 *Word Cloud (Awan Kata)* Nodus

Pemerintah Kota Sukabumi telah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikan *Collaborative Governance* untuk mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kawasan Jalan Lettu Bakri, Yulius Usman, dan Pasundan. Upaya tersebut meliputi penguatan koordinasi lintas instansi, penerapan pendekatan persuasif dalam penertiban, serta penyediaan relokasi bagi pedagang. Dalam perspektif kepemimpinan fasilitatif, pemerintah daerah berperan menginisiasi koordinasi, mengakomodasi kepentingan para pihak, dan mendorong pengambilan keputusan secara kolektif. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan efektivitas lokasi relokasi, sehingga sebagian pedagang kembali ke lokasi semula karena rendahnya jumlah pembeli dan tingginya biaya sewa.

Optimasi sumber daya dilakukan melalui pembagian wilayah patroli yang lebih efisien dan koordinasi antar instansi. Sekretaris Dinas Perhubungan menegaskan: "Upaya yang dilakukan antara lain memperkuat kesepakatan, komitmen bersama, pakta integritas, serta meningkatkan edukasi kepada pedagang, pengguna parkir, dan ASN." Satpol PP juga mendorong adanya relokasi resmi yang disiapkan pemerintah daerah agar penertiban bukan sekadar memindahkan masalah, tetapi memberikan solusi berkelanjutan.

Inovasi komunikasi dilakukan melalui pemanfaatan media sosial, media cetak, dan pelibatan tokoh masyarakat sebagai mediator. Namun, upaya pemerintah masih menghadapi tantangan, terutama terkait keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan ketersediaan tempat relokasi yang terjangkau. Korelasi antara kode "Relokasi" dan "Penurunan Pendapatan" (r = 0,943) menegaskan bahwa upaya struktural tanpa dukungan ekonomi akan rapuh. Upaya pemerintah dapat dikategorikan sebagai intervensi struktural yang progresif namun memerlukan pendalaman sosial, menuntut pergeseran dari pendekatan command-and-control menuju enable-and-empower.

3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi *Collaborative Governance* dalam Penyelenggaraan Trantibum di Kota Sukabumi

Berdasarkan hasil analisis, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Sukabumi. Faktor pendukung utama meliputi: (1) adanya landasan regulasi daerah yang memadai berupa Perda Nomor 2 Tahun 2004 dan Perda Nomor 10 Tahun 2013 sebagai payung hukum bersama; (2) keberadaan forum koordinasi lintas sektor yang memungkinkan dialog antaraktor; (3) kepemimpinan fasilitatif yang mendorong pengambilan keputusan kolektif; serta (4) dukungan kepolisian melalui patroli rutin yang memperkuat efek pencegahan.

Adapun faktor penghambat yang teridentifikasi antara lain: (1) ketimpangan peran antaraktor, terutama absennya unsur akademisi dan media dalam forum kolaborasi; (2) keterbatasan anggaran dan personel yang membatasi intensitas pengawasan pasca-penertiban; (3) lokasi relokasi di Pasar Pelita yang dinilai kurang strategis sehingga memicu boomerang effect; serta (4) rendahnya kepercayaan sebagian pedagang terhadap konsistensi kebijakan pemerintah. Temuan ini sejalan dengan argumen Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) bahwa keberhasilan *Collaborative Governance* ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, ketersediaan sumber daya, dan tingkat kepercayaan antaraktor dalam sistem kolaborasi.

3.5 Rekomendasi Penguatan *Collaborative Governance* dalam Penyelenggaraan Trantibum di Kota Sukabumi

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi strategis guna memperkuat implementasi *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan Trantibum di Kota Sukabumi. Pertama, perlu dilakukan formalisasi komitmen kolaborasi melalui penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) antarpihak yang terlibat, sehingga kesepakatan operasional berkembang menjadi komitmen tertulis yang mengikat. Kedua, keterlibatan unsur Penta Helix perlu diperluas dengan mengintegrasikan peran aktif akademisi dan media sebagai mitra strategis dalam edukasi dan pemantauan kebijakan ketertiban umum.

Ketiga, solusi relokasi perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan aksesibilitas pasar, keterjangkauan biaya sewa, dan kelayakan ekonomi pedagang sebagai pihak yang terdampak langsung. Keempat, pemerintah daerah perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan pasca-penertiban yang melibatkan perangkat kecamatan dan kelurahan secara aktif. Kelima, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan alokasi anggaran yang proporsional bagi instansi pelaksana merupakan prasyarat untuk menjamin keberlanjutan program penyelenggaraan ketertiban umum yang efektif, inklusif, dan berbasis prinsip enable-and-empower.

3.6 Diskusi Temuan utama Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Sukabumi telah menerapkan prinsip-prinsip Collaborative Governance melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Dinas Perhubungan, Bappeda, Diskumindag, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta unsur masyarakat. Keterlibatan berbagai aktor tersebut mengindikasikan adanya kesadaran bahwa penyelesaian permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum tidak dapat dilakukan oleh satu instansi secara mandiri, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor.

Tabel 3.5
Temuan Utama Penelitian

No.	Aspek Temuan	Deskripsi Temuan	Relevansi Teori
1.	Implementasi *Collaborative Governance*	Kolaborasi telah berjalan melalui forum koordinasi lintas sektor dengan mekanisme penertiban bertahap (SP1, SP2, SP3), namun bersifat prosedural dan belum substantif. Boomerang effect masih terjadi akibat relokasi yang kurang optimal.	Dimensi Institutional Design dan *Collaborative Process (Ansell & Gash, 2008)*
2.	Peran dan Sinergi Antaraktor	Sinergi terbangun antara Satpol PP, Dishub, Diskumindag, Polres, kecamatan, dan kelurahan. Namun sinergi bersifat top-down coordinated dan belum sepenuhnya inklusif; unsur akademisi dan media hampir tidak terlibat.	*Model Penta Helix* (Kelvin dkk., 2022); Kolaborasi Hibrida
3.	Upaya Pemerintah Daerah	Pemerintah melaksanakan tiga aspek utama: penguatan kelembagaan, optimasi sumber daya, dan inovasi komunikasi. Namun keberlanjutan program terkendala solusi relokasi yang belum optimal dan keterbatasan anggaran.	Pendekatan Enable-and-Empower (Emerson dkk., 2012)

Sumber: Olah Data NVivo 15, 2026

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terbangun masih cenderung berorientasi pada aspek administratif dan prosedural. Forum koordinasi yang dilaksanakan telah mampu mempertemukan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan penertiban, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan hubungan kolaboratif yang mampu membangun kepercayaan dan komitmen bersama secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *Collaborative Governance* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan struktur koordinasi, tetapi juga oleh kualitas interaksi antaraktor yang terlibat.

Temuan ini sejalan dengan konsep *Collaborative Governance* yang menekankan pentingnya dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan (trust building), komitmen terhadap proses, serta pemahaman bersama (shared understanding) sebagai faktor utama keberhasilan kolaborasi. Dalam konteks Kota Sukabumi, mekanisme

koordinasi telah berjalan, namun pembangunan hubungan kolaboratif yang lebih partisipatif masih perlu diperkuat agar setiap aktor memiliki rasa kepemilikan terhadap tujuan bersama yang ingin dicapai.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa pembagian peran antarinstansi telah relatif jelas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi koordinasi operasional di lapangan, terutama ketika berhadapan dengan kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan penertiban. Oleh karena itu, efektivitas *Collaborative Governance* memerlukan penguatan komunikasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan bahwa tujuan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dapat tercapai secara optimal.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah munculnya kondisi yang menunjukkan bahwa keberhasilan penertiban secara administratif tidak selalu diikuti oleh penerimaan sosial dari kelompok sasaran kebijakan. Meskipun kegiatan penertiban telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan melibatkan berbagai instansi terkait, masih ditemukan resistensi dari sebagian pedagang dan masyarakat yang terdampak. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan aturan, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa pemerintah Kota Sukabumi telah melakukan berbagai upaya inovatif melalui penguatan kelembagaan, optimalisasi sumber daya, dan peningkatan komunikasi antaraktor. Namun, pendekatan yang digunakan masih didominasi oleh intervensi struktural. Padahal, keberlanjutan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun hubungan yang lebih partisipatif dengan kelompok masyarakat yang terdampak secara langsung.

Menariknya, penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat belum berada pada posisi yang setara dengan aktor pemerintah dalam proses kolaborasi. Masyarakat lebih sering menjadi objek kebijakan dibandingkan sebagai mitra yang terlibat aktif dalam perumusan solusi. Kondisi tersebut menyebabkan proses kolaborasi belum sepenuhnya menghasilkan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap kebijakan yang dijalankan. Apabila partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, maka peluang terciptanya ketertiban umum yang berkelanjutan akan semakin besar.

Temuan ini memberikan gambaran bahwa tantangan utama *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bukan hanya terletak pada koordinasi antarinstansi, tetapi juga pada kemampuan membangun kepercayaan, partisipasi, dan kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif yang lebih inklusif dan berorientasi pada dialog menjadi kebutuhan penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Sukabumi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik tiga kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, implementasi *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan Trantibum di Kota Sukabumi telah berjalan melalui mekanisme koordinasi dan komunikasi lintas sektor (20 referensi) yang terstruktur, namun masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya substantif, sehingga boomerang effect masih terlihat pada lokus penelitian.

Kedua, peran serta sinergi antaraktor dalam penyelenggaraan Trantibum di Kota Sukabumi telah terbangun melalui pembagian tugas kelembagaan yang relatif jelas, namun masih menghadapi tantangan dalam konsistensi koordinasi operasional dan inklusivitas partisipasi dari sisi pedagang yang ditindaki.

Ketiga, upaya pemerintah Kota Sukabumi dalam mengimplementasikan *Collaborative Governance* dapat dikategorikan sebagai intervensi struktural yang progresif namun memerlukan refleksi lebih dalam aspek sosial. Saat ini telah dilaksanakan tiga aspek utama yaitu penguatan kelembagaan, optimasi sumber daya, dan inovasi komunikasi, namun keberlanjutannya masih terkendala oleh solusi relokasi yang belum optimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada waktu pelaksanaan penelitian dan keterbatasan dalam menjangkau seluruh aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Sukabumi. Selain itu, penelitian hanya difokuskan pada kawasan Jalan Lettu Bakri, Jalan Yulius Usman, dan Jalan Pasundan sebagai lokasi penelitian sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan secara menyeluruh kondisi *Collaborative Governance* pada seluruh wilayah Kota Sukabumi.

Arah Masa Depan Penelitian *(future work).* Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini masih terbatas pada kajian *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di beberapa lokasi penelitian. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan pada wilayah yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak aktor kolaborasi, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Sukabumi maupun daerah lainnya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi, Polres Sukabumi Kota, Kecamatan Warudoyong, Kelurahan Nyomplong serta para pedagang dan warga masyarakat Kota Sukabumi yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan informasi selama proses pengumpulan data. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pemerintahan dan peningkatan kualitas tata kelola ketertiban umum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, M. N., Tri Anomsari, E., Novira, A., & Sudartini, S. (2022). *Collaborative Governance*: Suatu Tinjauan Konseptual Model *Collaborative Governance* dan Implementasi Pencapaian SDGs pada Studi Intervensi Stunting di Pemerintah Daerah. Bandung: Deepublish, ISBN : 9786230253508.

Ahad, M. P. Y., & Barsei, A. N. (2023). *Collaborative Governance* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Practice dari Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Transformasi Administrasi, 13(1), 52–60. https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.236.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory,* 18(4), 543–571. DOI:10.1093/jopart/mum032.

Bukalova, D. (2024). *Recognizing the Importance of Collaborative Competencies and Facilitative Leadership in Local Government in the United States. International Journal of Public Leadership,* 20(3/4). DOI:10.1108/IJPL-11-2023-0093.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications,* ISBN: 978-1452226101 .

Devine, B. N., Wirantaria, I. D. A. P., & Purnamaningsih, P. E. (2024). *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Pengaduan Kelompok Rentan pada DISKOMINFO Badung dan Yayasan MBM. Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN), 2(1), 363–372. DOI:10.61292/eljbn.142.

Dupuy, C., & Defacqz, S. (2022). *Citizens and the Legitimacy Outcomes of Collaborative Governance: An Administrative Burden Perspective. Public Management Review,* 24(5), 752–772. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.2000254 .

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012*). An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory,* 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011.

Eviany, Eva & Sutiyo. (2023.) Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan. Klaten & Makassar: PT. Nas Media Indonesia. ISBN:978-623-155-142-9.

Firdausi, F., Primasworo, R. A., & Abdillah, A. (2023). *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Probolinggo. Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 13(1), 162–171. : DOI:10.33366/rfr.v13i1.4513.

Ilham, M., & Rahman, A. (2023). Praktikum Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Bandung: PT Pustaka Interes Media Amani. ISBN: 978-623-09-7128-0.

Kelvin, K., Widianingsih, I., & Buchari, R. A. (2022). Kolaborasi *Model Penta Helix* dalam Mewujudkan Smart Village Pondok Ranji. Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan, 7(2), 1–15. https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i2.2587.

Labolo, M. (2011). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. Jakarta: Raja Grafindo Persada. ISBN: 978-979-769-567-5.

Mutiarawati, T., & Sudarmo, S. (2021). *Collaborative Governance* dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. Jurnal Wacana Publik, 1(1), 82–98. https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.50892.

Qi, H., & Ran, B. (2024). *Paradoxes in Collaborative Governance. Public Management Review,* 26(10), 2728–2753. https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2196290Published.

Rusliadi, R., & Hasriadi, H. (2025). Analisis Pendekatan *Collaborative Governance* dalam Mengatasi Masalah Stunting di Indonesia. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 12(1), 22–35. e-ISSN 2614-2945.

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (5th ed.). Bandung: Alfabeta. ISBN: 978-602-289-533-6.

Sumartono, S., & Hermawan, H. (2020). *The Reform of Public Service Bureaucracy in the Investment Sector Within the Pentahelix Perspective: A New Hope in the Era of Autonomy? Australasian Accounting, Business and Finance Journal,* 14(1), 33–45. https://doi.org/10.14453/aabfj.v14i1.4.

Ndraha, T. (2005). *Teori budaya organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta. ISBN: 979-518-939-5.

Wismayanti, K. D. W., Purnamaningsih, P. E., & Surpa, I. W. (2024). *Collaborative Governance*. Sleman: Deepublish. ISBN: 978-623-02-8094-8.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.*